

**PROGRAM SATU RUMAH SATU SARJANA  
STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI DESA PONGGOK  
POLANHARJO KLATEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Disusun Oleh:**

**Wahyu Muslimah**

**NIM 14250094**

**Pembimbing :**

**Dr. Arif Maftuhin, MAIS**

**197402022001121002**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Muslimah  
NIM : 14250094  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Program Satu Rumah Satu Sarjana Studi Implementasi Kebijakan Di Desa Pongkok Polanharjo Klaten adalah hasil karya pribadi dan bukan hasil plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Agustus 2019

Yang menyatakan,



## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Muslimah

NIM : 14250094

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menerima resiko apapun yang berkaitan dengan pemakaian foto berjilbab pada ijazah dan tidak akan menuntut pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta jika dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Agustus 2019

buat Pernyataan,  
  
Wahyu Muslimah  
14250094



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
JL. Marsda Adisucipto Tlp. (0274) 515856  
Yogyakarta 55181

---

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

---

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu Muslimah

NIM : 14250094

Judul skripsi : Program Satu Rumah Satu Sarjana Studi Implementasi Kebijakan Di Desa Pongkok Polanharjo Klaten

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Kesejahteraan sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut diatas dapat segera di Munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Agustus 2019  
Pembimbing,

  
Dr. Arif Maftuhin, MAIS  
NIP. 197402022001121002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Kesejahteraan Sosial

  
Andayani, S.IP, MSW  
NIP. 197210161999032008



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-788/Un.02/DD/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PROGRAM SATU RUMAH SATU SARJANA STUDI IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN DI DESA PONGGOK POLANHARJO KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU MUSLIMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 14250094  
Telah diujikan pada : Rabu, 11 September 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.  
NIP. 19740202 200112 1 002

Penguji II

Dr. H. Zainudin, M.Ag.  
NIP. 19660827 199903 1 001

Penguji III

Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si  
NIP. 19770317 200604 2 001

Yogyakarta, 11 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dekan



Dr. H. Nuzjannah, M.Si.  
NIP. 19600310 198703 2 001

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang terkasih:**

Kedua orang tua saya, Ibu Sri Suranti dan Bapak Subarno, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur serta rezeki yang berkah.

kakak dan adik saya

Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan.

Teman-teman tersayang, terima kasih telah menemani saya di segala situasi dan kondisi.

Seluruh guru saya, terima kasih atas ilmu yang diberikan.

Almamater saya, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

## **MOTTO**

*Saat Allah mendorongmu ke tebing, yakinlah kalau hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Mungkin saja Ia akan menangkapmu, atau Ia ingin kau belajar bagaimana caranya terbang.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala Puji bagi Allah yang telah mencurahkan segala nikmat, rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Program Satu Rumah Satu Sarjana: Studi Implementasi Kebijakan di Desa Pongkok Polanharjo Klaten” sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rosulullah Muhammad SAW yang telah menunjukan umatnya pada jalan kebenaran.

Alhamdulillah, pada kesempatan ini penulis menghaturkan segenap rasa terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, saran dan kritik serta bantuan moral maupun materil dari berbagai pihak. Rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Ibu Andayani, SIP, MSW selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini dan yang telah membimbing dan mengarahkan selama perkuliahan



4. Bapak Dr. Arif Maftuhin, MAIS selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah banyak memberikan masukan, membimbing dengan sabar dan meluangkan waktunya untuk diganggu sehingga skripsi ini selesai. Semoga amal kebaikan bapak dibalas oleh Alloh SWT, semoga setiap urusan Bapak dimudahkan Oleh Alloh SWT.
5. Seluruh dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
6. Seluruh staff tenaga pendidikan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terutama kepada Bapak Sudarmawan, yang telah membantu memperlancar urusan surat menyurat dan Bapak Mul yang telah banyak membantu mengamankan kunci motor.
7. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Subarno dan Ibu Sri Suranti, terimakasih atas limpahan doa, cinta dan kasih sayangnya selama ini. Terima kasih telah menjadikan saya anak yang beruntung karna lahir sebagai anak kalian.
8. Kakak dan adik saya, terima kasih atas semua perhatian dan doanya.
9. Sahabat-sahabat saya tercinta: Zyorisa, Feni, Crusyta, Iim, Putri, Binti, Shofi, Naili Azizah, Bagus Irfan Rifai, dan Endah Pratika Ningrum, terima kasih atas canda tawa, dan motivasinya agar saya segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga pertemanan kita dapat terjaga dengan baik hingga kelak.

10. Teman pertama saya di perkuliahan, Faroha semoga pertemanan kita dapat terjaga sampai kelak. Terima kasih telah banyak memberikan motivasi untuk saya.
11. Teman satu bimbingan saya, Anggita dan Shofa Amalia, semangat.
12. Teman-teman KKN saya: Hasyim Asy'ari, Hafid Mukti, Sholachudin Ar Rouf, Amanda Buana, Ika, Khadijah, Anwar Baihaqi, Sidqi Wildan syah dan Agus Suparman. Terima kasih untuk pengalaman hidup bersama selama satu setengah bulan yang luar biasa dan tidak terlupakan.
13. Masyarakat Dusun Crangah Desa Hargotirto Kulon Progo, terima kasih untuk waktu-waktu yang menyenangkan.
14. Teman-teman Praktik Pekerja Lapangan, beserta Keluarga Besar Pondok Pesantren Nurul Qur'an Jumoyo Kidul Magelang. Terima kasih atas keramahannya.
15. Segenap Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa Ponggok yang telah membantu memberikan informasi.
16. Pengurus Harian Laboratorium Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yakni saudara Ahmad Jazuri dan Riko E, terima kasih telah banyak membantu.
17. Terakhir kepada seluruh teman dan orang-orang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini, terimakasih atas bantuan dan perhatiannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun semoga penelitian ini dapat memberikan secercah sinar terang bagi peneliti dan pembaca.

Akhirnya hanya kepada Alloh SWT kami memohon perlindungan dan pertolongan, semoga Ridho-Nya selalu menyertai kita dalam mengarungi kehidupan ini sehingga dapat membawa berkah dan manfaat. Serta kepada Rosulullah Muhammad SAW kami mengharapkan Syafa'atnya di Yaumul Akhir.

*Wasallamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 11 Juli 2019

Hormat Penyusun

Wahyu Muslimah

14250094

## **ABSTRAK**

Wahyu Muslimah, Program Satu Rumah Satu Sarjana: Studi Implementasi Kebijakan di Desa Pongkok Polanharjo Klaten. Skripsi, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dikarenakan pendidikan adalah bagian penting dalam meningkatkan harkat dan martabat Bangsa. Peningkatan pendidikan merupakan aspek penting dalam peningkatan ekonomi, hal tersebut dikarenakan perkembangan ekonomi akan sulit dicapai apabila tidak tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut Desa Pongkok mengulirkan berbagai program pendidikan untuk mencerdaskan masyarakatnya, program tersebut diantaranya adalah Program Satu Rumah Satu Sarjana.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Satu Rumah Sarjana di Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan oleh Edwards III yang menyangkut keberhasilan suatu program kebijakan di dasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Pongkok telah dilakukan sebagaimana mestinya. Komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Pongkok dalam melaksanakan program tersebut tinggi, komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak terkait berjalan dengan baik, struktur birokrasi dalam pelaksanaan program tersebut jelas, sumber daya yang dimiliki guna menunjang pelaksanaan program memadai, namun program ini belum memiliki standar prosedur operasi yang baku dan tertulis. Respon masyarakat terhadap program tersebut cukup baik. Masyarakat dan mahasiswa terbantu dengan adanya program tersebut, tetapi program tersebut belum maksimal dalam meningkatkan antusias warganya untuk melanjutkan pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Program Satu Rumah Satu Sarjana**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	30
H. Sistematika Pembahasan .....	40

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Ponggok.....	38
B. Gambaran Umum Program Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Ponggok .....	54
C. Profil Informan.....	57

### **BAB III: PROGRAM SATU RUMAH SATU**

#### **SARJANA STUDI IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA PONGGOK POLANHARJO KLATEN**

A. Proses Implementasi .....	61
B. Implementasi Kebijakan .....	62
1. Tahap Interpretasi.....	62
2. Tahap Pengorganisasian .....	64
3. Tahap Aplikasi .....	70
C. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi .....	71
1. Komunikasi .....	72
2. Ketersediaan Sumber Daya .....	75
3. Sikap dan Komitmen dari Pelaksana (Disposisi) .....	82
4. Stuktur Birokrasi .....	84
5. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Satu Rumah Satu Sarjana.....	86
D. Perlindungan Sosial.....	94
1. Program Satu Rumah Satu Sarjana dalam sudut pandang perlindungan sosial.....	96
2. Program Satu Rumah Satu Sarjana sebagai bentuk bantuan sosial.....	96

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aplikasi Konseptual model Edword III Perspektif Kebijakan Publik .....	25
Tabel 2.1 Data Jumlah Penduduk Desa Pongkok berdasarkan jenis Kelamin .....	42
Tabel 2.2 Data Jumlah Penduduk Desa Pongkok berdasarkan padukuhan .....	42
Tabel 2.3 Data Jumlah Penduduk Desa Pongkok berdasarkan kelompok Pendidikan.....	43
Tabel 2.4 Data Jumlah Penduduk Desa Pongkok berdasarkan kelompok Pekerjaan .....	44
Tabel 2.5 Data Jumlah Penduduk Desa Pongkok berdasarkan kelompok Kepercayaan.....	45
Tabel 2.6 Data fasilitas pendidikan Desa Pongkok.....	45
Tabel 2.7 Data fasilitas umum Desa Pongkok .....	46
Tabel 2.8 Daftar penerima program satu Rumah satu Sarjana Di Desa Pongkok .....	56
Tabel 2.9 Data penerima Program Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Pongkok berdasarkan Jenis Perguruan Tinggi .....	58
Tabel 2.10 Data penerima Program Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Pongkok berdasarkan Jenjang Pendidikan yang di tempuh .....	58
Tabel 3.1 Kewenangan Implementer Program Satu Rumah Satu Sarjana Di Desa Pongkok .....	66
Tabel 3.2 Peran Pihak dalam Implemtasi kebijakan satu Rumah satu Sarjana Di Desa Pongkok .....	85

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Peta Wilayah Desa Pongkok .....	38
--	----



## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ponggok.....	53
Bagan 3.1 Faktor Penentu Implementasi Program Satu Rumah Satu Sarjora Di Desa Ponggok .....	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan element penting dalam kehidupan manusia, pendidikan merupakan proses belajar sepanjang hayat yang di mulai sejak manusia lahir hingga pada saat terakhir kehidupannya. Pendidikan ini berlangsung baik secara formal maupun informal. Pendidikan informal pertama kali dirasakan seseorang ketika ia baru lahir, pendidikan tersebut didapatkan dari pengajaran orang tua. Kemudian dalam perjalanannya seorang individu bebas memilih untuk mendapatkan pendidikan formal atau informal sesuai dengan yang dikehendaki.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pendidikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>1</sup> Pendidikan merupakan sebuah rekayasa sosial untuk mengangkat dan martabat manusia agar dapat mengembangkan peran sosialnya dengan sempurna.<sup>2</sup> Kualitas pendidikan merupakan cerminan keberhasilan suatu Negara, dewasa ini hampir setiap Negara menggunakan pendidikan sebagai salah satu sistem utama dalam membangun karakter bangsa.

Dalam pengertian dasar pendidikan adalah proses menjadi, yakni menjadikan seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan> diakses pada 1 Januari 2019

<sup>2</sup> Nanang Martanto, *Sekolah Publik Vs Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi dan Liberalisasi Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonsia, 2017), hlm x.

bakat, watak dan kemampuan dan hati nuraninya secara utuh. Proses pendidikan diarahkan pada proses berfungsinya semua potensi individu secara manusiawi agar mereka menjadi dirinya sendiri yang mempunyai kemampuan dan kepribadian unggul.<sup>3</sup>

Secara fisiologis tanggung jawab pendidikan melekat pada keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks rumah tangga negara, pendidikan merupakan hak setiap warga negara, maka di dalamnya mengandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada warganya.<sup>4</sup>

Pengelolaan sistem pembangunan pendidikan seharusnya dirancang dan dilaksanakan secara maksimal dengan mengedepankan mutu pendidikan. Sistem yang terbangun sebaiknya menunjang ke efisienan dan ke efektifitasan, pelayanan pendidikan harus berorientasi pada upaya peningkatan akses pelayanan yang luas dan mudah bagi masyarakat.

Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dalam upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.<sup>5</sup> Pembangunan pendidikan menjadi penting karna pembangunan ekonomi akan sulit digerakan apabila Sumber Daya Manusianya (SDM) tidak mempunyai kemampuan. Sebagai bahan pertimbangan dapat dilihat

---

<sup>3</sup> Dedy, Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* (PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 2.

<sup>4</sup> M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Persepektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektik Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 29.

<sup>5</sup> Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 43.

negara-negara tetangga seperti, Jepang, Korea, Singapura yang tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai namun memiliki SDM yang handal sehingga mendukung pergerakan ekonomi negara.<sup>6</sup>

Dalam konvensi hak anak, pendidikan merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi dan di dapat oleh setiap anak. Pasal 31 Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.<sup>7</sup> Janji tersebut kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, pada pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.<sup>8</sup>

Dalam pasal 11 ayat 2 undang-undang tersebut mengatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna menyelenggarakan pendidikan bagi warga yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun . Berdasarkan undang-undang tersebut maka telah disepakati bahwa wajib belajar di Indonesia adalah selama sembilan tahun.<sup>9</sup>

Pendidikan di Indonesia bukannya tanpa masalah, potret buram pendidikan kita muncul kepermukaan hampir setiap tahun. Salah satu yang paling populer adalah isu pembiayaan. Meskipun Undang-Undang No. 20

---

<sup>6</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm 22.

<sup>7</sup> Nanang Martanto, *Sekolah Publik Vs Sekolah Privat ...*, hlm xi.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 Ayat (1).

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 Ayat (2).

Tahun 2003 telah mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diluar sekolah kedinasan, namun kenyataannya hanya beberapa daerah saja yang mampu menggratiskan biaya pendidikan 9 tahun. Itupun sebagian hanya untuk sekolah negri, bahkan tidak sepenuhnya gratis, masih terdapat beberapa pungutan biaya dari sekolah yang teknis dan pengaturannya dilakukan oleh sekolah atau komite sekolah.<sup>10</sup>

Hal tersebut adalah hal biasa karena apabila ditinjau pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan Pendidikan disebutkan pada Pasal 2 ayat 1 bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi 3 hal yaitu: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan serta biaya pribadi peserta didik.<sup>11</sup>

Selain dari masalah pembiayaan, terdapat pula masalah-masalah lain seperti masalah pembangunan infrastruktur yang tidak merata, pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah kualitas dan kuantitas guru sampai dengan relevansi pendidikan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa diantara masalah-masalah tersebut, pembiayaan masih merupakan faktor yang paling mendominasi. Kemampuan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan menentukan angka partisipasi sekolah di negara ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS),

---

<sup>10</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan...*, hlm 30.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 31.

Angka capaian Partisipasi Kasar (APK) angka usia dini atau PAUD dengan rentang usia 3-5 tahun secara nasional mencapai angka 33,83% dengan target sebesar 77,2% untuk SD/ sederajat dan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat nilainya sudah melebihi 100% Namun untuk jenjang yang lebih tinggi nilai APKnya kian menurun bahkan untuk jenjang perguruan tinggi jika dibuat perbandingan maka hanya 1 dari 4 orang yang mengikuti jenjang Perguruan Tinggi (PT).<sup>12</sup>

Pendidikan yang berkualitas pada hakikatnya adalah tujuan dan impian setiap Negara hal tersebut dikarenakan peningkatan kualitas pendidikan disuatu Negara adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Kemajuan dibidang pendidikan akan menjadi pendorong kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Untuk itu perlu adanya peran aktif semua pihak dalam memaksimalkan kapasitasnya guna mencapai tujuan bersama.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial pendidikan merupakan unsur penting dalam terciptanya keadaan sejahtera. Menurut James Midgley keadaan sejahtera merupakan keadaan dimana terpenuhinya tiga unsur yakni, pertama, ketika masalah sosial dapat di atasi dengan baik, kedua, ketika kebutuhan terpenuhi dan ketiga, ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.<sup>13</sup>

Dalam konteks indonesia, kesejahteraan sosial dapat dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal

---

<sup>12</sup> Katalog BPS, *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan Tahun 2017*, hlm 3.

<sup>13</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hlm.,72.

material, spiritual, maupun sosial. Pendidikan diharapkan mampu mendorong terealisasinya potensi yang dimiliki setiap individu secara maksimal. Selain itu pendidikan juga mendorong terbukanya peluang-peluang sosial. Disinilah diperlukan peran pemerintah dalam meningkatkan program pendidikan dan menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap warga masyarakat untuk memperoleh apa yang diinginkan.

Berdasarkan regulasi PP No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian dimaknai sebagai pembagian wewenang, Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyediaan pendanaan semua level pendidikan dan program, serta penyediaan sumber daya untuk tingkat pendidikan dan subsidi silang (pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah dan pendidikan non formal).<sup>14</sup>

Sementara itu Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendanaan tingkat menengah, pendidikan vokasional dan pendidikan khusus. Selain itu Pemerintah Provinsi juga dapat menyediakan tambahan sumber daya atau subsidi untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.<sup>15</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas sebuah Desa di Klaten, Jawa Tengah mengulirkan program-program di bidang pendidikan. Desa tersebut adalah Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Desa yang ekonominya tengah berkembang pesat tersebut mempunyai komitmen tinggi

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*,

dalam rangka mencerdaskan masyarakatnya guna mencapai tujuan bersama yakni sebagai Desa maju yang mampu membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Komitmen tersebut di wujudkan melalui program-programnya. Salah satunya dibidang pendidikan yakni terbentuknya Program Stimulan Satu Rumah Satu Sarjana.

Alasan dipilihnya Desa Ponggok sebagai lokasi penelitian dikarenakan Desa Ponggok merupakan satu-satunya desa yang memiliki berbagai program di bidang pendidikan salah satunya yakni Program Stimulan Satu Rumah Satu Sarjana selain itu progam tersebut pernah menjadi bahasan nasional dalam acara Tv program Mata Najwa di Metro TV.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul **Program Satu Rumah Satu Sarjana Implementasi Kebijakan di Desa Ponggok Polanharjo Klaten)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Program Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Ponggok Polanharjo Klaten di Implementasikan ?”



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana Program Satu Rumah Satu Sarjana diimplementasikan di Desa Ponggok Polanharjo Klaten.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan di peroleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Implementasi Program Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Ponggok Polanharjo Klaten.

#### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk membentuk program-program sosial desa khususnya dalam bidang pendidikan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti telah meninjau dan menimbang beberapa penelitian yang relevan dengan fokus penelitian ini. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang telah dilakukan oleh Aqmarina Ramadhani yang berjudul, (*Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*) hasil dari penelitian itu menunjukkan manfaat dari BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat desa baik dari segi pendidikan, perekonomian, kesehatan, pendapatan masyarakat Desa Ponggok yang meningkat. Hal ini dibuktikan berdasarkan program dan kinerja BUMDes yang membantu meningkatkan pembangunan Desa Ponggok menjadi lebih baik.<sup>16</sup>

*Kedua*, Penelitian yang telah dilakukan oleh Murba yang berjudul (*Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Ericinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*) Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pembangunan Infrastruktur di Desa Ericinnong masih belum memenuhi harapan masyarakat atau masih mengecewakan (tidak optimal), karena beberapa program pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dalam bidang jalan yang masih tidak terlihat ada perubahan dari beberapa tahun silam, listrik dan jaringan yang masih belum terealisasi hingga saat ini bahkan beberapa tahun belakangan ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Selanjutnya mengenai faktor penghambat implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Ericinnong ada beberapa factor yaitu 1). Keterbatasan anggaran, 2). Tidak terjalannya

---

<sup>16</sup> Aqmarina Ramadhani, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kecamatan Polan Harjo Kabupaten Klaten*, Skripsi (Semarang: Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, 2017).

komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, 3). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan beberapa faktor lain seperti ketidak bersatuan masyarakat Desa Ericinnong dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa serta kontruksi bangunan yang kurang bagus.<sup>17</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariani yang berjudul (*Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*) Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) belum berjalan dengan baik hal ini dilihat dari pelaksanaan program yang ini tidak berjalan lagi serta banyak kekurangan dari berbagai indikator diantaranya sumber daya, hubungan antar organisasi, dan disposisi implementor.<sup>18</sup>

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan Muhammad Erwin Dianto yang berjudul (*Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak {KLA} di Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*) Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada implementasi program KLA terdapat tahapan yang dilakukan implementer. Tahapan tersebut meliputi tahapan interpretasi, tahap

---

<sup>17</sup> Murba, *Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Ericinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*, Skripsi (Makasar, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Allauddin Makasar, 2017).

<sup>18</sup> Desi Arini, *Implentasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, Skripsi ( Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatra Utara, 2018 )

pengorganisasian, dan tahap pengaplikasian. Pengaplikasian program KLA yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah Sendangtirto bekerjasama dengan kader tiap-tiap padukuhan dan stakeholder meliputi lima klaster pemenuhan hak anak yaitu: klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster perlindungan, klaster infrastruktur serta klaster lingkungan hidup, budaya dan pariwisata. Pelaksanaan program KLA dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap dan faktor struktur birokrasi. Faktor disposisi atau sikap adalah kunci keberhasilan program KLA mengingat didalamnya terdapat kesungguhan, kecakapan, kejujuran dan komitmen dari implementer untuk mengimplementasikan program KLA. Program ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam perlindungan pemenuhan hak-hak anak. Namun dalam pelaksanaannya, keterbatasan sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh para implementer, dapat memperlambat laju pelaksanaan program KLA.<sup>19</sup>

*Kelima, Jurnal, Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*, Penelitian dilakukan oleh Asna Aneta, Dosen Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan wawancara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program unggulan kemiskinan di Kota

---

<sup>19</sup> Muhammad Erwin Dianto, *Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

Gorontalo, mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas Pemerintah Gorontalo dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat kebeterrimaan masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan program kemiskinan dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo.

Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas Pemerintah Kota Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan mendukung program penanggukanan kemiskinan, dan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Kebijakan P2KP di Kota Gorontalo.<sup>20</sup>

*Keenam*, Jurnal, Implementasi Program Sekolah Adiwiyata (studi pada Sekolah Dasar Negeri Manukan Kulon III/540 Kota Surabaya ) Penelitian ini dilakukan oleh Yanti Dwi Rahmah, penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan Sekolah Dasar Negeri Manukan lolos dalam seleksi tahap Kota namun sekolah tersebut mengalami kegagalan dalam mencapai penghargaan Adiwiyata. Kegagalan tersebut dikarenakan tenaga pendidik yang kurang

---

<sup>20</sup> Asna Aneta, “ *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*”, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1:1 (2010), hlm 1.

kompak, sedangkan pada faktor eksternal dipengaruhi oleh adanya renovasi gedung.<sup>21</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Implentasi Kebijakan Sosial terkait dengan permasalahan yang diteliti, sehingga mampu untuk memberikan jawaban dan memperjelas dalam membahas permasalahan pelaksanaan Program Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

### **1. Tinjauan Implementasi**

#### **a. Konsep Implentasi Kebijakan**

Pengunaan istilah implementasi kebijakan muncul ke permukaan beberapa dekade lalu, orang yang pertama kali memperkenalkan istilah implementasi kebijakan adalah Harold Laswell yang merupakan Ilmuan pertama yang mengembangkan studi kebijakan publik. Studi kebijakan publik menurutnya merupakan pendekatan proses (*policy process approach*). Pendekatan tersebut mengatakan bahwa untuk memahami kebijakan publik harus melalui tahapan-tahapan yaitu: *Agenda-setting*, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Menurut siklus kebijakan publik tersebut dapat diketahui bahwa implementasi hanyalah salah satu tahap dalam proses kebijakan

---

<sup>21</sup> Yanti Dwi Rahmah, *Implementasi Program Sekolah Adiwiyata Studi Pada Manukan Kulon III/540 Kota Surabaya*, *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 2:4, 2014, hlm 1.

publik dirumuskan.<sup>22</sup> Pada tahun 1973 Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky mengembangkan studi implementasi kebijakan publik. Mereka secara eksplisit mengungkapkan konsep implementasi untuk menjelaskan fenomena kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai sasarannya.<sup>23</sup> Pada perkembangan selanjutnya bermunculan pakar-pakar yang menaruh perhatian terhadap studi implementasi.<sup>24</sup>

Webster dan Wahab mendefinisikan implementasi sebagai sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dapat menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu tertentu.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Jones implementasi merupakan satu tahap tindakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan, *Pertama*, merumuskan tindakan yang dilakukan, *Kedua*, melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan.<sup>26</sup>

Donald S. Van Meter dan Carl E. Va menguraikan tentang batasan implementasi, menurutnya implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok), swasta yang

---

<sup>22</sup> Erwan Agus dan Dyah Ratri, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm 17.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 18.

<sup>25</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), hlm 86.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>27</sup>

Mazmanian dan Sabatier mengungkapkan bahwa implementasi tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berlangsung atau tidak berlangsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan akhirnya berdampak pada yang diharapkan (*intented*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended*) dari suatu program.<sup>28</sup>

Pengertian implementasi berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dapat melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok) yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.<sup>29</sup>

Secara ontologis, *subject matter* studi implementasi adalah memahami fenomena implementasi kebijakan publik seperti: *Pertama*, mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 87.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 88.



di suatu daerah, *Kedua*, mengapa suatu kebijakan publik yang sama yang dirumuskan pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah, *Ketiga*, mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain, *Keempat*, mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.<sup>30</sup> Fenomena tersebut kemudian mendorong upaya untuk memetakan faktor atau variabel apa saja yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi.

Para ahli melalui berbagai penelitian memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan. Akumulasi dari faktor-faktor tersebut kemudian disebut sebagai model implementasi kebijakan. Model implementasi ini pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan realitas implementasi kebijakan yang rumit menjadi lebih sederhana yaitu sebagai hubungan sebab akibat antara keberhasilan implementasi dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi.<sup>31</sup>

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan publik oleh Van Mater dan Van Horn, Edward III, Grindle dan model implementasi kebijakan publik oleh Mazmanian dan Sabatier. Dalam

---

<sup>30</sup> Erwan Agus dan Dyah Ratri, *Implementasi Kebijakan Publik...*, hlm 18.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

penelitian yang Implementasi Program Satu Rumah Satu Sarjana yang dilakukan di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten ini peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Edward III.

## **b. Proses Implementasi Kebijakan**

Proses implementasi kebijakan merupakan kegiatan merumuskan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realitas nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*outputs*), dampak (*outcomes*) dan manfaat (*benefit*) serta dampak (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).<sup>32</sup>

Dalam proses implementasi kebijakan terdapat tiga kegiatan yang harus dilakukan, antara lain: tahap Interpretasi (*Impretation*), Pengorganisasian (*to Organized*) dan aplikasi (*Aplication*). Berikut adalah proses tahapan implementasi kebijakan:<sup>33</sup>

### **1) Tahap Interpretasi (*Interpretation*)**

Tahap Interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan dalam kebijakan

---

<sup>32</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*..., hlm 88.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 89.

manajerial (*magerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*). Dalam aktivitas interpretasi kebijakan juga diikuti dengan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholder*) dapat mengetahui arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan.<sup>34</sup>

## 2) Tahap Pengorganisasian (*to organized*)

Pada tahap pengorganisasian ini proses kegiatan akan mengarah pada:

### a) Pelaksana Kebijakan (*policy implementor*)

Pelaksana kebijakan yaitu penetapan siapa saja yang akan terlibat menjadi pelaksana kebijakan (penentu lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya. Pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan dan pelaksana kebijakan mencakup *Pertama*, Badan, Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan pemerintah daerah. *Kedua*, Sektor Swasta (*private sectors*). *Ketiga*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Keempat*, Komponen Masyarakat. Penetapan ini juga mencakup penetapan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 90.

b) Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*)<sup>35</sup>

Standar prosedur oprasi digunakan sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan dan mengetahui sasaran dan untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan sebuah kebijakan. Standar Prosedur Operasional (SOP) ini juga digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan oleh permasalahan pada saat melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karna itu setiap kebijakan perlu membuat prosedur tetap (Protap) atau prosedur baku berupa prosedur operasional dan atau Standar Pelayanan Minim (SPM).<sup>36</sup>

c) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Penetapan sumber daya keuangan dan perlatan adalah proses lanjutan setelah ditetapkannya pelaku kebijakan dan standar prosedur oprasional. Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tergantung pada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun untuk sumber anggaran dapat ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat, dan lain-lain. Kemudian untuk jenis peralatan sangat bervariasi

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 91.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 92.

tergantung pada kebutuhan dan jenis kebijakan. Penetapan ini perlu guna memaksimalkan pelaksanaan kebijakan.<sup>37</sup>

d) Penetapan Manajemen Pelaksana Kebijakan

Manajemen pelaksana kebijakan lebih ditekankan pada pola kepemimpinan dan kordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Perlunya kejelasan pelaku kebijakan dan pola kepemimpinan yang digunakan yakni apakah menggunakan pola kolegal atau menunjuk suatu lembaga sebagai koordinator yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector*.<sup>38</sup>

e) Penetapan Jadwal Kegiatan

Penetapan jadwal kegiatan diperlukan guna memaksimalkan kinerja pelaksanaan kebijakan. Jadwal yang telah ditetapkan wajib dipatuhi oleh pelaku kebijakan secara konsisten, selain itu penetapan jadwal kegiatan ini juga digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sekaligus standar dalam menilai kinerja pelaksana terutama dilihat dari proses pelaksanaan kebijakan.<sup>39</sup>

### 3) Tahap Aplikasi (*Application*)

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 91.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 92

<sup>39</sup> *Ibid.*,

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahap interpretasi dan pengorganisasian. Tahap dalam implementasi dimulai dengan kegiatan mengelola peraturan yakni: membentuk organisasi, memilih pelaku kebijakan, menganalisa dan menetapkan sumber daya, teknologi, penerapan prosedur minimal dan seterusnya guna mewujudkan tujuan kebijakan.<sup>40</sup>

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan dalam Proses Implementasi**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam proses implementasi, faktor tersebut dapat datang dari luar maupun dari dalam kebijakan tersebut. Menurut Sabatier terdapat enam variable utama yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu proses implementasi, enam variable tersebut yaitu:

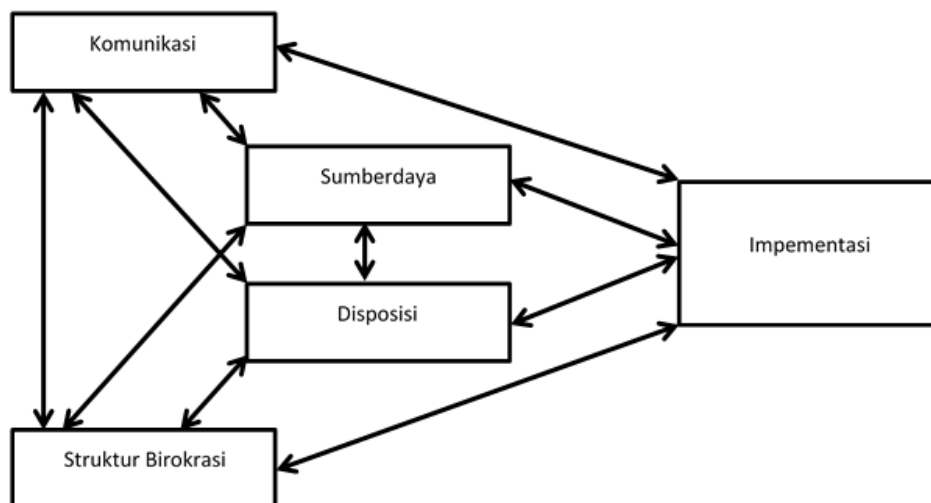
- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas lapangan dan kelompok sasaran;
- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 64.

- e. Dukungan para *stakeholder*;
- f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.<sup>41</sup>

Tidak setiap kebijakan mempunyai model implementasi kebijakan yang sama, tiap-tiap kebijakan memerlukan model implementasi kebijakan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Keberhasilan atau kegagalan suatu proses implementasi Program Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dapat diketahui menggunakan model implementasi kebijakan menurut cara pandang George C. Edward III. Pengaruh efektivitas implentasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III ini adalah sebagai berikut:



George berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yang saling berhubungan satu sama lain yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 20.

<sup>42</sup> AG Subarsono, “*Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 94-99.

## 1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan sendiri merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.<sup>43</sup> Agar tercapai keberhasilan implementasi kebijakan maka implementator atau pelaksana kebijakan wajib mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran sebuah kebijakan agar dapat mentransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi.

## 2. Sumber Daya (*Resource*)

Faktor sumber daya mengambil peran penting bagi kelancaran implementasi kebijakan, implementasi kebijakan yang berhasil bukan hanya didukung oleh komunikasi dan konsistensi implementer terhadap ketentuan dan aturan-aturan yang telah dibuat tetapi juga harus didukung dengan sumber daya yang memadai, sumber daya ini berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan yang meliputi (gedung, peralatan, tanah dan suku cadang lain) dan sumber daya informasi dan wewenang yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.<sup>44</sup>

### a. Sumber Daya Manusia

---

<sup>43</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*..., hlm 97.

<sup>44</sup> *Ibid.*,



Agar implemtasi kebijakan dapat mencapai tujuan maka dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup (jumlah) dan cakap (keahlian) efektivitas pelaksanaan kebijakan akan sangat tergantung pada sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.<sup>45</sup>

#### b. Sumber Daya Anggaran

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya dana atau anggaran dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai oprasional pelaksanaan kebijakan.<sup>46</sup> Terbatasnya anggaran akan sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada publik.

#### c. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk oprasionalisasi implentasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang berguna untuk memudahkan pemberian pelayanan dalam implementasi kebijakan.<sup>47</sup> Keterbatasan fasilitas akan menghambat pelaksanaan kebijakan terlebih lagi jika keterbatasan tersebut berupa keterbatasan dalam hal teknologi informasi yang mengakibatkan akses informasi menjadi tidak akurat.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> *Ibid.*,

### 3. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam proses implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup yang berkaitan dengan cara pengimplementasian kebijakan, serta informasi tentang kerelaan dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi suatu kebijakan.<sup>48</sup>

### 4. Disposisi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan pada sejauh mana pelaku kebijakan mengetahui dan mampu melaksanakan peraturan yang telah dibuat dalam suatu kebijakan tetapi juga ditentukan oleh kemauan kuat, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakannya secara sungguh-sungguh, tidak hanya pada organisasinya tetapi juga dalam diri pribadinya.<sup>49</sup>

### 5. Struktur Birokrasi

Keefisienan struktur birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan yang terakhir, tersedianya sumber-sumber untuk implementasi kebijakan sering menjadi tidak maksimal mana kala struktur birokrasinya tidak efisien. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit organisasi. Selain itu struktur birokrasi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> *Ibid.*,

mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) yang akan mempermudah dan menyeragamkan tindakan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>50</sup>

Untuk memudahkan dalam memahami implementasi persepektif Edward III maka dapat dilihat peta kosep berikut:

**Tabel 1.2**

**Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi Kebijakan**

<b>Aspek</b>	<b>Ruang Lingkup</b>
Komunikasi	a. Siapa implementer dan kelompok sasaran dari program/ kebijakan b. Bagaimana Sosialisasi Program/kebijakan dijalankan? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode yang digunakan</li> <li>• Intensitas komunikasi</li> </ul>
Sumber daya	a. Kemampuan Implementor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Pendidikan</li> <li>• Tingkat Pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program</li> <li>• Kemampuan detail program dan mengarahkan</li> </ul> b. Ketersediaan Dana <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa dana yang di alokasikan</li> <li>• Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan</li> </ul>
Disposisi	Karakter Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Komitmen dan Kejujuran : diukur dengan tingkat konsistensi pelaksana dan aturan yang telah ditetapkan</li> <li>• Tingkat demokratis : diukur degan intensitas pelaksana melakukan sharing pada kelompok sasaran</li> </ul>
Struktur Birokrasi	a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami b. Stuktur organisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur</li> </ul>

<sup>50</sup> *Ibid.*,

	organisasi pelaksana
--	----------------------

Sumber : Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis<sup>51</sup>

### 3. Teori Perlindungan Sosial

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan ketahanan sosial. Menurut Asian Development Bank (ADB), perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari berbagai bencana dan kehilangan pendapatan.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Edi Suharto perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan atau program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan (*vulnerability*) melalui perluasan pasar kerja yang efisien. Pengurangan resiko-resiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan kehilangan pendapatan.<sup>53</sup>

Perlindungan sosial dapat di definisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam

---

<sup>51</sup> Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (Yogyakarta: Gava Media, 2009) hlm 34.

<sup>52</sup> <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2015/03/perlindungan-dan-jaminan-sosial.html> diakses pada 24 September 2019

<sup>53</sup> *Ibid.*,

resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.

#### **a. Tujuan Perlindungan sosial**

Terdapat tiga tujuan utama perlindungan sosial

1. Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan.
2. Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidaksamaan sosial ekonomi.
3. Memungkinkan kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.<sup>54</sup>

#### **b. Jenis-jenis Jaminan Sosial**

Jaminan sosial dapat dibedakan menjadi dua yakni asuransi sosial (*social insurance*) dan bantuan sosial (*social assistance*).

##### **1. Asuransi sosial**

Asuransi sosial merupakan jaminan sosial yang diperuntukan bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Asuransi sosial meliputi asuransi kesehatan (Askes), Asuransi bagi TNI/POLRI, jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) asuransi kecelakaan (jasa raharja), asuransi pensiun (taspen).

---

<sup>54</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm 66.

## 2. Bantuan sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang baik dari pemerintah maupun individu, keluarga atau kelompok yang bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.<sup>55</sup> bantuan sosial ini seperti jaminan kesejahteraan sosial, baik yang bersifat sementara atau pemanen, bantuan dana pendidikan berupa beasiswa melalui skema jarring pengaman sosial (JPS) bagi keluarga miskin, dan bantuan dana kesehatan.

### c. Jaminan Sosial di Bidang Pendidikan

Pengalaman di banyak Negara menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang lebih menekankan pada aspek fiskal dan pertumbuhan ekonomi ternyata telah mengalami kegagalan. Oleh karena itu pembangunan nasional dewasa ini lebih berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan modal utama kesejahteraan suatu bangsa karena tanpa SDM yang memadai pembangunan suatu negara menjadi tidak optimal.

Landasan hukum pembangunan sistem perlindungan dan jaminan sosial di bidang pendidikan adalah Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Sistem perlindungan dan jaminan sosial di bidang pendidikan pada saat ini masih merupakan kegiatan jaring perlindungan sosial (JPS) bidang pendidikan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

Kegiatan utama yang diprioritaskan antara lain pada upaya-upaya mengurangi angka putus sekolah yang cenderung meningkat pada tingkat SD dan SLTP, yang merupakan paket wajib belajar Sembilan tahun dan untuk mencegah menurunnya kualitas pendidikan dasar. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pemberian bantuan beasiswa untuk murid SD,SLTP, dan SLTA dalam mencegah terjadinya peningkatan angka putus sekolah.<sup>56</sup>

## G. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah di paparkan diatas maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dilapangan<sup>57</sup> Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,

<sup>57</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm 10.

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>58</sup> Mekanisme dalam penelitian ini adalah penelitian mendeskripsikan hasil temuan berupa data yang kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang akan digunakan oleh peneliti. Penjelasan yang dijabarkan peneliti harus detail dan jelas sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Realita di lapangan dicantumkan berdasarkan yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan bukti keaslian sebuah penelitian. Uraian tersebut dilakukan dengan melampirkan bukti berupa hasil wawancara dan dokumentasi agar penelitian ini lebih menarik dan mudah dipahami secara mendalam.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap masyarakat Desa Pongkok yang bertempat di Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dalam menjawab tantangan rendahnya tingkat pendidikan di desa tersebut. Alasan peneliti memilih Desa Pongkok sebagai kajian penelitian adalah dikarenakan desa pongkok merupakan salah satu desa di Klaten yang memiliki komitmen kuat untuk memajukan pendidikan di wilayahnya terbukti dengan dibentuknya berbagai program pendidikan.

## 3. Objek dan Subjek Penelitian

---

<sup>58</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakrya cet. 23, 2007), hlm 6.



Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan dan informasi.<sup>59</sup> Sedangkan subjek penelitian menurut Amirin merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan, sedangkan Suharsimi Arikunto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian akan diamati.<sup>60</sup>

Objek penelitian kualitatif disebut *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>61</sup> Objek penelitian adalah mengenai Penyelenggaraan Program Desa Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Ponggok Polanharjo Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk Subjek penelitiannya adalah seluruh element masyarakat desa yang terlibat baik dalam pembuatan kebijakan maupun warga masyarakat yang menikmati program tersebut.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling yakni pengambilan subjek penelitian dengan

---

<sup>59</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm 92.

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.....*, hlm 91.

<sup>61</sup> Andi Prastowo, *Metode Peneliian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm 199.

mempertimbangkan pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa kriteria, mengingat subjek penelitian ini dilakukan kepada tiga kelompok berkepentingan maka kriteria setiap kelompoknya berbeda. Pada kelompok pemerintah desa kriteria yang ditentukan yakni, pegawai kelurahan yang terlibat dalam pembentukan maupun pelaksanaan program, pada kelompok warga masyarakat ditentukan kriteria yakni warga desa ponggok baik keluarga penerima maupun yang mengetahui program tersebut, sedangkan untuk mahasiswa ditetapkan kriteria, mahasiswa sebagai penerima program tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau

ruang, waktu dan keadaan tertentu.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan. Observasi non partisipan yaitu observasi dimana peneliti tidak memposisikan dirinya sebagai anggota kelompok yang diteliti.<sup>63</sup>

Observasi digunakan untuk mengetahui gambaran umum yang terdapat di Desa Ponggok sehingga peneliti dapat memperoleh data yang sesuai dan yang diperlukan dalam penelitian. Fakta yang ada dilapangan untuk kemudian didokumentasikan melalui foto sebagai bahan dokumentasi penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk menginformasikan tentang suatu peristiwa yang terjadi dilapangan.

Objek yang diobservasi dapat berupa kantor kepala Desa Ponggok sebagai tempat utama program tersebut dirumuskan dan diimplentasikan. Sehingga dapat didalamnya ditemukan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam kepentingan penggalan data pada penelitian ini.

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan secara lengkap, untuk kemudian dianalisis dan didefinisikan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber pada saat pengambilan data dilapangan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi sejak tanggal 5 November-10 Maret 2019.

#### b. Wawancara

---

<sup>62</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat penelitian & Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 165.

<sup>63</sup> M. Hariwijaya, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, (Yogyakarta: Elmatara, 2017), hlm 58.

Wawancara dapat berarti banyak hal atau wawancara memiliki banyak definisi tergantung konteksnya. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>64</sup> Sasaran objek penelitian adalah element desa ponggok yang meliputi, perangkat desa, warga masyarakat dan mahasiswa penerima program baik yang sedang maupun yang pernah menerima. Beberapa sampel yang di pilih nantinya akan dijadikan sebagai rujukan data dalam penelitian ini.

Pemilihan informan ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengali informasi, karena pemilihan informan tersebut dianggap memenuhi kreteria mampu memberikan informasi yang akurat mengenai program desa tersebut. Kriteria dari pemilihan informan ini adalah:

- 1) Untuk perangkat desa adalah perannya dalam Program desa Satu Rumah Satu Sarjana.
- 2) Bekerja sebagai perangkat desa lebih dari satu tahun.
- 3) Sedangkan untuk masyarakat ialah orang yang mengetahui tentang adanya program desa tersebut.
- 4) Sedangkan untuk mahasiswa adalah orang yang pernah merasakan atau sedang menerima manfaat dari program tersebut.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 2.

### c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bernarasumber dari arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperlukan merupakan foto-foto data monografi penduduk, dan data penerima Program Stimulan Satu Rumah Satu Sarjana.

## 5. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya ada 3 pembagian analisis data, yaitu analisis data studi pendahuluan, analisis data di lapangan dan analisis data setelah dari lapangan.<sup>66</sup> Secara ringkas data yang telah didapatkan setelah di lapangan direduksi. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam atau memfokuskan penelitian menuju kesimpulan dari penelitian.<sup>67</sup> Data yang berwujud kata-kata atau bukan rangkaian kata. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara,

---

<sup>65</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 165.

<sup>66</sup> Dr. M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 143.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm 147.

intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alat tulis), tetapi analisis kualitatif tetap dengan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.<sup>68</sup>

Berikut ini adalah model analisis dari Huberman dan Miles yaitu dengan membagi 3 tahapan yaitu,

a. Reduksi

Tahapan ini dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Reduksi data tidak harus menunggu data terkumpul banyak. Artinya bisa dilakukan secara berkala. Pada proses ini, peneliti akan banyak menyingkirkan beberapa data yang dianggap tidak relevan. Namun lebih baik data tersebut tidak dihilangkan. Karena bisa jadi data tersebut diperlukan pada tema-tema yang lain.<sup>69</sup>

b. Penyajian data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data

---

<sup>68</sup> Mettew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, terj.Tjejep Rohendi Rohindi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm 15.

<sup>69</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 150.

adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun.<sup>70</sup>

c. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti dari data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan pada proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema-tema yang sama, pengelompokan, pencarian kasus (hal yang berbeda di masyarakat).<sup>71</sup>

Untuk penarikan kesimpulan dapat berlangsung saat pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Kesimpulan ini tidak permanen. Karena peneliti dapat melakukan verifikasi kembali jika terdapat penelitian baru. Kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancaranya.<sup>72</sup>

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 151.

<sup>71</sup> *Ibid*.,

<sup>72</sup> *Ibid*.,

bersifat mengabungkan dari berbagai sumber yang telah ada.<sup>73</sup> Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah:<sup>74</sup>

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat pandangan seperti rakyat biasa, orang-orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintah.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini hasil wawancara yang diperoleh di cari kebenarannya melalui dokumen pendukung maupun wawancara lain dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka triangulasi data.

---

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm 327.

<sup>74</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm 322-323.

<sup>75</sup> *Ibid.*,



## 7. Tahap-Tahap Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berurutan agar memudahkan dalam melaksanakan penelitian, tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, tahap persiapan penelitian mencakup didalamnya persiapan, fokus masalah, dan peninjauan lokasi penelitian.
- b. Tahap pencarian data, pada tahap ini fokus yang dituju adalah memperoleh data yang relevan dan valid dengan pokok bahasan penelitian.
- c. Tahap pemeriksaan keabsahan data, tahap ini dimulai ketika peneliti mulai terjun ke lapangan penelitian.
- d. Tahap analisis data, tahap ini merupakan tahapan yang digunakan peneliti dalam memperoleh jawaban atas masalah penelitian, sehingga akan diperoleh jawaban dari data-data tersebut.
- e. Tahap penarikan kesimpulan, tahap ini merupakan pernyataan sikap yang dipaparkan dari hasil penelitian atau bahasan.
- f. Tahap penyusunan laporan, tahap ini merupakan tahap akhir dalam sebuah penelitian.

## H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan dan pembahasana skripsi ini, berikut paparan sistematika dalam beberapa bagaian. Hal ini di maksudkan untuk menghasilkan penulisan dan penyusunan secara sistematis.

Isi skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Adapun sistematika bagian awal terdiri dari halaman judul, nota dinas pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, daftar table, daftar gambar dan bagan.

Sedangkan bagian utama skripsi terdiri atas:

Bab I, berisi pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian ini. Sebagai landasan awal dalam melakukan penelitian. Bab I ini terdiri atas, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori metode penelitian dan sistematika pembahasan serta tahap-tahap penelitian.

Bab II, berisi tentang gambaran umum Desa Ponggok Polanharjo Klaten, bab ini menguraikan tentang profil desa termasuk didalamnya sejarah, letak dan batas wilayah, data kependudukan, visi dan misi, struktur organisasi pemerintahan dan gambaran keadaan sosial masyarakat serta sarana prasarana yang ada di Desa Ponggok Polanharjo Klaten. Dalam bab ini pula akan diuraikan mengenai gambaran umum Program Stimulan Satu Rumah Satu Sarjana.

Bab III, memuat tentang hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu Implementasi Program Stimulan Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Ponggok serta faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya program ini dan respon masyarakat terhadap program.

Bab IV, bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap semua uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya dan pemberian saran-saran

khususnya untuk penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan Program Stimulan Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Ponggok Polanharjo Klaten.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai studi implementasi program satu rumah satu sarjana di Desa Ponggok Polanharjo Klaten, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri desa ponggok melakukan pembangunan desa di berbagai aspek. Program Satu Rumah Satu Sarjana merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Desa ponggok dalam membangun desa melalui aspek pendidikan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Program Stimulan Satu Rumah Satu Sarjana mulai diselenggarakan pada tahun 2015 hingga saat ini. Dibuatnya program Satu Rumah Satu Sarjana dilatar belakangi oleh rendahnya minat anak-anak desa ponggok untuk melanjutkan pendidikan ditingkat Perguruan Tinggi. Tujuan Program ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Ponggok, agar di masa depan masyarakat desa ponggok dapat mengelola Sumber daya alamnya sendiri.
3. Implementasi Program Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Ponggok dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi. Tahap interpretasi ini dimulai dari kegiatan musyawarah yang dilakukan pemerintah desa ponggok bersama dengan elemen masyarakat desa guna menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDES), kegiatan selanjutnya merupakan sosialisasi program-program desa melalui pemasangan spanduk dll, Pada Tahap pengorganisasian, pemerintah desa membentuk tim pelaksana program sekaligus menyusun standart prosedur oprasional (SOP), sumber daya keuangan dan peralatan. Sedangkan pada tahap aplikasi kegiatan yang dilakukan adalah menyalurkan Stimulan dan monitoring pelaksanaan program.

4. Tahap pelaksana Program Satu Rumah Satu Sarjana di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
  - a. Faktor komunikasi, komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan mahasiswa berjalan dengan baik.
  - b. Faktor sumber daya, faktor ini meliputi sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan informasi. Sumber daya manusia yang dimiliki desa ponggok sudah mencukupi dan mampu memerankan fungsinya masing-masing. Sedangkan dari segi sumberdaya keuangan desa ponggok juga telah memiliki sumber daya yang memadai, sumber daya keuangan yang menjadi sumber pendanaan program ini diambil dari pendapat bagi hasil pajak 10% dari pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota. Faktor disposisi atau sikap, sikap yang ditunjukan oleh implementer Program Stimulan Satu Rumah Satu Sarjana telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Faktor ini mencakup beberapa aspek seperti, komitmen, kejujuran, kemampuan komunikasi dan dedikasi.

Sikap-sikap tersebut menjadi kunci keberhasilan program Stimulan saru rumah satu sarjana di desa Ponggok.

- c. Faktor struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terbangun dari berbagai pihak telah berjalan dengan baik.

## **B. Saran**

Setelah dilakukan penelitian tentang Program Satu Rumah Satu Sarjana: Studi Implementasi Kebijakan di Desa Ponggok Polanharjo Klaten terdapat beberapa saran yang peneliti rangkum untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan pihak-pihak berkepentingan dalam hal ini pemerintah Desa Ponggok dan peneliti berikutnya yang lebih baik.

Bagi Pemerintah Desa :

1. Perlu adanya rekapitulasi data yang lengkap dan akurat terkait dengan keseluruhan jumlah penerima program sejak awal berdirinya program hingga saat ini. Hal ini diperlukan sebagai bahan evaluasi dalam implementasi program.
2. Perlu adanya evaluasi program guna meningkatkan minat bagi masyarakat maupun calon mahasiswa.
3. Perlu adanya Standar operasional prosedur yang baku guna menunjang implementasi program.

Bagi Penelitian selanjutnya:

1. Perlu adanya penelitan lebih lanjut terkait jumlah statistik yang menunjukkan adanya kenaikan atau penurunan jumlah mahasiswa di Desa

Ponggok sebelum dan setelah adanya program Stimulan Satu Rumah Satu Sarjana.

2. Perlu adanya penelitian yang menjelaskan secara detail dampak yang terjadi baik dalam aspek sosial maupun ekonomi sebelum dan sesudah diselenggarakannya program Satu Rumah Satu Sarjana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Erwan dan Dyah Ratri. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Aneta, Asna, *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*, Jurnal Vol. 1 No. 1, Gorontalo, Universitas Gorontalo, 2010.
- Arini, Desi , “*Implentasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*,” Skripsi Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatra Utara, 2018
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Potret Pendidikan di Indonesia Statistik Pendidikan 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.  
<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YTVmMWRIOWUwNmE2MmUzMzNiYzdhdMzNj&xzmn.html>. diakses pada 01 januari 2019.
- B, Metthew dan A Michael Hubberman, Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru, Terj, Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Bagoes, Ida, Mantra, *Filsafat penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Djamal, M, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dwi, Yanti, Rahmah, *Implementasi Program Sekolah Adiwiyata Studi Pada Manukan Kulon III/540 Kota Surabaya*, Jurnal Administrasi Publik, vol.2:4, 2014, hlm.1.
- Erwin, Muhammad, “*Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa*” Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fattah, Nanang, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Habulah, M, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015.
- Hariwijaya, M, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Yogyakarta: Elmatara, 2017).



- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- J.Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Kisah Sukses Desa Pongok dalam Mengembangkan Bumdes*”, Youtube, [https://www.youtube.com/watch?v=G\\_fLqM33XAs](https://www.youtube.com/watch?v=G_fLqM33XAs), diakses tanggal 12 Februari 2019.
- Martanto, Nanang, *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah: Mengungkap Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi*, Yogyakarta: Gava Media 2010.
- Martono, Nanang, *Sekolah Publik Vs Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Murba, *Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Ericinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*, Skripsi, Makasar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negri Allauddin Makasar, 2017.
- Mulyasana, Dedy, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Raco, J. R., *metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Ramadhani, Aqmarina, “*Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongok Kecamatan Polan Harjo Kabupaten Klaten*”, Skripsi Semarang: Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembanguna Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, 2017.
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabeta, 2013).
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: CV.Alfabeta, 2012.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
Pasal 6 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
Pasal 11 Ayat 2.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan  
pendidikan, Pasal 2 ayat 1.

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses  
Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012.

## **Lampiran**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Narasumber Pemerintah Desa**

1. Apa itu Program Satu Rumah Satu Sarjana ?
2. Bagaimana awal terbentuknya Program Satu Rumah Satu Sarjana ?
3. Apa yang hendak di capai dalam Program Satu Rumah Satu Sarjana ?
4. Bagaimana Pelaksanaan Program Satu Rumah Satu Sarjana ?
5. Siapa saja yang terlibat dalam Pelaksanaan Satu Rumah Satu Sarjana ?
6. Bagaimana Pendanaannya ?
7. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana masing-masing perannya ?
8. Bagaimana Komitmen Pemerintah Desa terhadap Program Satu Rumah Satu Sarjana ?
9. Bagaimana Respon Masyarakat terhadap Program Satu Rumah Satu Sarjana ?

#### **B. Narasumber Warga Desa**

1. Apakah anda mengetahui apa itu Program Satu Rumah Satu Sarja ?
2. Apakah anda mengetahui awal terbentuknya Program Satu Run Satu Sarjana ?
3. Apakah anda mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut ?
4. Apakah dalam keluarga anda ada yang menjadi penerima program tersebut ?

5. Apakah anda cukup puas dengan program-program yang ada di Desa Ponggok Khususnya Program Satu Rumah Satu Sarjana ?
7. Menurut anda bagaimana kinerja Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Satu Rumah Satu Sarjana ?
8. Bagaimana perbedaan yang terjadi ketika sebelum dan setelah adanya program Satu Rumah Satu Sarjana ?
9. Bagaimana pendapat anda mengenai Program Satu Rumah Satu Sarjana ?

### **C. Narasumber Mahasiswa**

1. Apa itu Program Satu Rumah Satu Sarjana ?
2. Apakah anda mengetahui awal terbentuknya program Satu Rumah Satu Sarjana ?
2. Apakah anda mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam Program Satu Rumah Satu Sarjana ?
4. Apakah anda mengetahui sumber pendanaan Program Satu Rumah Satu Sarjana ?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai Program Satu Rumah Satu Sarjana ?
6. Sejauh ini bagaimana Pelaksanaan Program Satu Rumah Satu Sarjana, adakah kendala ?
7. Bagaimana Kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan program ini ?

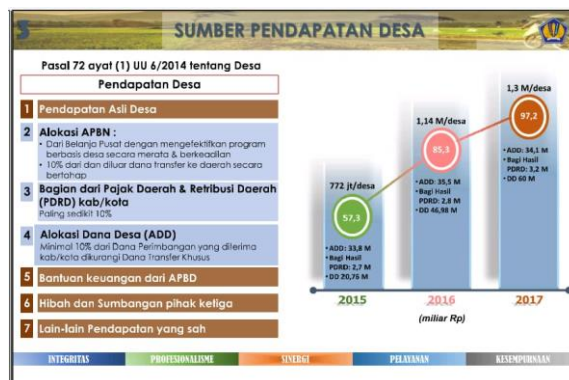
## Lampiran Foto-Foto

Banner laporan keuangan Desa Pongkok



Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) UU 6/2014

Tentang Dana Desa



Wilayah Desa Pongkok



Objek wisata Umbul Pongkok Desa Pongkok



Toko di sekitar wisata Umbul Pongkok



Gapura dukuh Kiringan Desa Ponggok



Gapura dukuh Ponggok Desa Ponggok



Papan petunjuk objek wisata Desa Ponggok

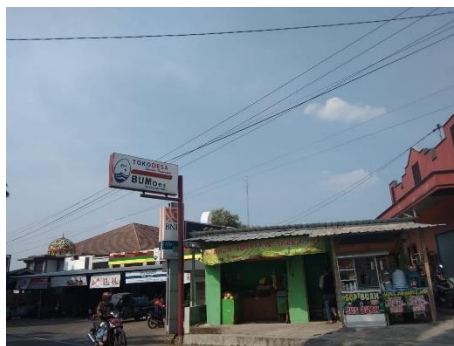


Kantor Kepala Desa Ponggok





Toko Desa Pongok yang diberdayakan oleh Bumdes Tirta Mandiri



Wawancara dan Observasi dengan Bapak Yani dan Bumdes Desa Ketro  
Kecamatan Kebon agung, Pacitan Jawa Timur di Pongkok Ciblon



Wawancara dengan Bapak Laskar Kepa Tata Usaha dan Umum Desa  
Pongkok





Wawancara dengan Ibu Ira Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pongkok



Wawancara dengan Ibu Sri Warga Desa Pongkok



Wawancara dengan Ibu Endang Warga Desa Pongkok

